

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN  
(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2021)**

Hari Prananda Aditya

NPP. 30.0100

Asdaf Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: hariprananda95@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri SE., M.Si., M.Ak

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The implementation of fiscal decentralization in Tebing Tinggi City is still not carried out optimally, so it is necessary to analyze financial ratios to assess the regional financial performance of Tebing Tinggi City and analyze the inhibiting factors and efforts made to overcome obstacles. Objective: The purpose of the study was to determine the results of Financial Ratio Analysis in Assessing Financial Performance (Study on the Government of Tebing Tinggi City, North Sumatra Province 2017-2021). Methods: This study uses Mahmudi's theory to assess regional financial performance using four ratios, namely the Regional Original Revenue Management Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Decentralization Degree Ratio and Regional Financial Dependency Ratio. The research method used is to conduct a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques through semi-structured interviews and documentation. Results/Findings: The results showed that the financial performance of Tebing Tinggi City was still low based on the calculation of the Regional Revenue Management Effectiveness Ratio of 88.36% (less effective), the Regional Financial Independence Ratio of 17.12% (very low), the Fiscal Decentralization Degree Ratio of 14.46% (less), and the Regional Financial Dependency Ratio of 84% (very high). Conclusion: The low financial performance assessment of Tebing Tinggi City is influenced by several obstacles, namely the lack of competent human resources, the lack of public awareness in paying levies and inadequate facilities and infrastructure. The efforts made by Tebing Tinggi City are improving the quality of human resources, implementing a digital-based service system and improving service supporting facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Fiscal Decentralization, Regional Financial Performance, Regional Original Income*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Tebing Tinggi masih belum dilakukan secara optimal sehingga diperlukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan daerah Kota Tebing Tinggi serta menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hasil Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021). **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Mahmudi untuk menilai kinerja keuangan daerah dengan menggunakan empat rasio, yaitu Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi masih rendah berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 88,36% (kurang efektif), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 17,12% (sangat rendah), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 14,46% (kurang), dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 84% (sangat tinggi). **Kesimpulan:** Penilaian kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi yang rendah dipengaruhi oleh beberapa hambatan yakni kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya yang dilakukan oleh Kota Tebing Tinggi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem pelayanan yang berbasis digital serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Nurdin (2017: 9) Pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah merupakan suatu bentuk pemberian wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat, berupa pelimpahan sebagian kekuasaan dan wewenang yang diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.

Pemberlakuan Otonomi Daerah turut diikuti dengan pemberian sebagian kewenangan fiskal kepada daerah dalam lingkup daerahnya sendiri dengan tetap mematuhi keputusan dan ketetapan Pemerintah Pusat, yang kemudian diketahui sebagai keuangan daerah. Adapun pengertian keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002: 9) adalah pekerjaan yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu berbentuk uang (rupiah). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode tertentu diperlukan adanya anggaran dan pembiayaan dalam pemerintah daerah agar perencanaan tersebut dapat terlaksana.

Kinerja keuangan daerah dapat juga dimaknai sebagai suatu bentuk ukuran pencapaian dari proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan melalui pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diketahui tentang proses pengelolaan keuangan suatu daerah, meliputi: kondisi keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan program pemerintah daerah dan proses pembiayaannya, serta untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan program, dengan tetap memperhatikan ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan dengan undang-undang. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2012: 231).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jumlah PAD Kota Tebing Tinggi selama 5 tahun terakhir, PAD Kota Tebing Tinggi kurang berkontribusi dalam total pendapatan daerah. Hal

tersebut dikarenakan kecilnya penerimaan PAD selama 5 tahun terakhir. Total pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi masih didominasi oleh bantuan transfer dari pemerintah pusat. berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya jumlah PAD yang dihasilkan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun kebelakang terbilang masih rendah. Begitu pula dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, masih berada pada angka dibawah 20%. Hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang masih belum dapat dikatakan baik, dan perlu dilakukan peningkatan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Faktor penghambat dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik disebabkan oleh belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasaranaq, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan ahli dalam bidang keuangan, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang masih minim. Penyebabnya adalah regulasi/aturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah masih belum memadai, sehingga membuat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi para wajib pajak dan retribusi yang tidak taat. Selain itu tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat, yang dapat dilihat dari nilai rasio ketergantungan keuangan daerah.

**Tabel 1**  
**Total Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021**

Uraian Pendapatan	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pajak Daerah	27.152.730.359	30.084.477.379	32.930.507.267	31.859.020.103	35.233.888.044
Retribusi Daerah	3.351.513.449	3.580.089.648	4.507.112.962	3.367.514.717	3.677.012.713
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.257.483.813	13.598.925.485	16.709.888.037	11.856.413.164	10.744.586.153
Lain-lain PAD yang Dipisahkan	74.461.147.066	66.784.861.629	51.092.410.085	43.898.353.763	33.274.837.138
<b>PAD</b>	<b>113.222.874.687</b>	<b>114.048.354.142</b>	<b>105.239.918.351</b>	<b>90.981.301.747</b>	<b>82.930.324.048</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan pada tabel 1 bahwa total PAD Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan pada periode 2017-2021, dengan jumlah rata-rata sebesar 110 milyar pertahun. Total penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah Rp 113.222.874.687, dan penerimaan terkecil pada tahun 2021 yakni sebesar 82.930.324.048. Jumlah yang demikian tentu PAD Kota Tebing Tinggi tidak dapat memberikan kontribusi secara besar terhadap total pendapatan daerah, sebagaimana yang akan dijabarkan pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2****Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2017	113.222.874.687	711.630.009.618	15,91
2018	114.048.354.142	717.784.276.096	15,88
2019	105.239.918.351	713.313.296.387	14,75
2020	90.981.301.747	659.635.054.093	13,79
2021	82.930.324.048	692.338.666.715	11,97

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data BPKPD Kota Tebing Tinggi, 2022.

Tabel di atas menunjukkan tentang besaran kontribusi PAD Kota Tebing Tinggi terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan tabel tersebut diketahui kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2017-2021 setiap tahunnya tidak mencapai angka 20%, dengan rata-rata selama lima tahun tersebut sebesar 14,46%. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya PAD Kota Tebing Tinggi hanya mampu memberikan kontribusi kurang dari 15% terhadap total pendapatan daerah. Lemahnya kontribusi tersebut terjadi dikarenakan kecilnya penerimaan PAD Kota Tebing Tinggi yang terjadi karena beberapa faktor, seperti salah satunya adalah belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Penelitian Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi (Kartika, D., & Kusuma, I. C, 2015). Penelitian ini menganalisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi APBD untuk menilai efektivitas, kemandirian, dan efisiensi Kabupaten Sukabumi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 rasio kemandirian keuangan kabupaten sukabumi tergolong sangat rendah (instruktif), rasio efektivitas PAD sebesar 105,67% (sangat efektif), dan rasio efisiensi PAD sebesar 5,02% (sangat efisien). Penelitian Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti (Novira Sartika, 2019). Penelitian ini menganalisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dan efektif, dilihat dari rata-rata rasio efisiensi PAD sebesar 72,84% dan rasio efektifitas PAD sebesar 103,65%. Penelitian Analisis Rasio Keuangan dalam APB untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020) (Ula, N. N. & Bharata, R. W., 2022). Penelitian ini menganalisis rasio keuangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupateng Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang masih belum baik, dapat dilihat dari rasio kemandirian sebesar 17,33% (instruktif), rasio efektivitas PAD sebesar 89,67% (cukup efektif), dan rasio efisiensi PAD sebesar 107,33% (tidak efisien). Penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Basis AkruaI Tahun 2014-2015 (Fathiyah, Masnun, 2017). Penelitian ini menganalisis rasio keuangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang diukur dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverage masih

dalam kategori baik dan dalam batas aman karena nilai semua rasio berada di atas standar industri, walaupun pada tahun 2015 terjadi penurunan pada semua rasio nilai karena pada tahun tersebut Pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga terjadi penurunan pada pos aset yaitu pada pos aset lancar karena penyisihan piutang dan pada pos aset tetap karena penyusutan aset tetap yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Penelitian Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Ritno H. Rondonuwu. Dkk, 2015). Penelitian ini menganalisis rasio keuangan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target PAD.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti mengambil judul sesuai dengan permasalahan dan kesenjangan yang terjadi yaitu Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokus penelitian dan periode waktu yang diteliti, selain itu penelitian ini hanya berfokus kepada pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kepada perhitungan PAD Kota Tebing Tinggi. Perbedaan yang lainnya terletak pada teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa sampel dan wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif saja maka mengumpulkan informasi dan data melalui wawancara terhadap pihak terkait. Perbandingan lainnya ialah pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar dalam penyusunannya dengan menggunakan 4 analisis rasio dalam pengukurannya.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021).

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Investasi, seta dua orang Staf dan Pelaksana Bidang Anggaran. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan mewawancarai 7 orang informan dan dokumentasi dari arsip Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh (Mahmudi, 2019: 140-141) yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan

daerah menggunakan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mengukur kinerja keuangan daerah di Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan teori (Mahmudi, 2019: 140-141) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui besar tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditentukan dengan analisis rasio keuangan. Peneliti menggunakan 4 analisis rasio keuangan dari 9 analisis rasio keuangan dalam melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan yang digunakan, yaitu Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019: 141). Semakin tinggi rasio efektivitas suatu daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut, apabila suatu daerah memiliki rasio mendekati 100% dapat dikatakan daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Menurut Halim (2004: 232) Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019: 141):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut dapat dihitung seberapa besar efektivitas pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target yang telah dianggarkan, seperti berikut:

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{113.222.874.687,17}{121.584.410.113,00} \times 100\% = 93,15\% \\ 2018 &= \frac{114.048.354.142,71}{105.579.950.493,00} \times 100\% = 108,02\% \\ 2019 &= \frac{119.116.990.780,10}{105.239.918.351,52} \times 100\% = 88,35\% \\ 2020 &= \frac{90.981.301.747,13}{110.798.461.164,00} \times 100\% = 82,11\% \\ 2021 &= \frac{82.930.324.048,00}{118.392.343.818,00} \times 100\% = 70,05\% \end{aligned}$$

Kemudian hasil perhitungan berdasarkan data pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi tersebut disajikan dalam bentuk tabel, sebagaimana pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**

**Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2017	113,222,874,687.17	121,548,410,113.00	93,15	Cukup Efektif
2018	114,048,354,142.71	105,579,950,493.00	108,02	Sangat Efektif
2019	105,239,918,351.52	119,116,990,780.10	88,35	Kurang Efektif
2020	90,981,301,747.13	110,798,461,164.00	82,11	Kurang Efektif
2021	82,930,324,048.00	118,392,343,818.00	70,05	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>88,36</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: Diolah dari LRA Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memenuhi target pencapaian asli daerah yang telah dianggarkan masih kurang efektif, adapun penyebabnya dikarenakan penurunan penerimaan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu 2017-2021, selain itu Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tebing Tinggi yang masih belum mampu untuk memberikan kontribusi besar ke dalam PAD Kota Tebing Tinggi.

### 3.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri, terlepas dari campur tangan ataupun bantuan pemerintah pusat. Menurut Halim (2004: 128) “rasio kemandirian keuangan daerah membuktikan bahwa tingkat kinerja keuangan suatu daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat yang telah menyeter pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah.” Semakin mendekati 100% nilai rasio kemandirian yang didapatkan maka semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Mahmudi, 2019: 140)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemudian dengan menggunakan rumus di atas dan data pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dihitung tingkat kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Rasio Kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan PAD Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan total transfer yang diterima pemerintah daerah, seperti berikut:

$$2017 = \frac{113.222.874.687,17}{598.407.134.931,00} \times 100\% = 18,92\%$$

$$2018 = \frac{114.048.354.142,71}{603.735.921.954,00} \times 100\% = 18,89\%$$

$$2019 = \frac{105.239.918.351,52}{608.073.378.036,00} \times 100\% = 18,20\%$$

$$2020 = \frac{90.981.301.747,13}{568.653.752.346,00} \times 100\% = 15,99\%$$

$$2021 = \frac{82.930.324.048,00}{609.408.342.667,00} \times 100\% = 13,6\%$$

Kemudian hasil perhitungan rasio kemandirian dengan menggunakan rumus di atas dapat dijabarkan dalam bentuk tabel, sebagaimana pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4**

**Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021**

Tahun	PAD (Rp)	Transfer Pusat+Provinsi +Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2017	113,222,874,687.17	598.407.134.931,00	18,92	Sangat Rendah	Instruktif
2018	114,048,354,142.71	603.735.921.954,00	18,89	Sangat Rendah	Instruktif
2019	105,239,918,351.52	578.073.378.036,00	18,20	Sangat Rendah	Instruktif
2020	90,981,301,747.13	568.683.752.346,00	15,99	Sangat Rendah	Instruktif
2021	82,930,324,048.00	609.408.342.667,00	13,6	Sangat Rendah	Instruktif
<b>Rata-rata</b>			<b>17,12</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber: Diolah dari LRA Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun kebelakang Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak memiliki kinerja yang baik dalam hal kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Penyebabnya dikarenakan jumlah PAD yang kecil, sehingga peran dan campur tangan dari pemerintah pusat masih lebih dominan.

### 3.3. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menggambarkan seberapa besar kontribusi PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai kontribusi derajat desentralisasi menunjukkan semakin besar kontribusi PAD terhadap dalam total pendapatan daerah. Nilai Rasio Derajat Desentralisasi dipengaruhi oleh besaran PAD, semakin tinggi jumlah PAD yang didapat oleh Pemerintah Daerah menunjukkan tingginya nilai derajat desentralisasi daerah. Untuk menghitung derajat desentralisasi, menurut Mahmudi (2019:140), digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus rasio derajat desentralisasi dapat dihitung seberapa besar kontribusi PAD Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap total pendapatan daerah, seperti perhitungan berikut:

$$2017 = \frac{113.222.874.687,17}{711.630.009.618,17} \times 100\% = 15,91\%$$

$$2018 = \frac{114.048.354.142,71}{717.784.276.096,71} \times 100\% = 15,88\%$$

$$2019 = \frac{105.239.918.351,52}{713.313.296.387,52} \times 100\% = 14,75\%$$



$$2020 = \frac{90.981.301.747,13}{659.635.054.093,13} \times 100\% = 13,79\%$$

$$2021 = \frac{82.930.324.048,00}{692.338.666.715,00} \times 100\% = 11,97\%$$

Kemudian hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi di atas dapat dijabarkan ke dalam tabel sebagaimana pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5**

**Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2017	113,222,874,687.17	711.630.009.618,17	15,91	Kurang
2018	114,048,354,142.71	717.784.276.096,71	15,88	Kurang
2019	105,239,918,351.52	713.313.296.387,52	14,75	Kurang
2020	90,981,301,747.13	659.635.054.093,13	13,79	Kurang
2021	82,930,324,048.00	692.338.666.715,00	11,97	Kurang
<b>Rata-rata</b>			14,46	Kurang

Sumber: Diolah dari LRA Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD Kota Tebing Tinggi dalam Total Pendapatan Daerah masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan belum mampunya Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk lebih dominan dibanding pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan.

**3.4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah. Tujuan dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah, dibandingkan dengan PAD tersebut. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Mahmudi, 2019: 140):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus rasio ketergantungan keuangan daerah maka dapat diketahui dapat diketahui seberapa besar campur tangan pihak luar pemerintah daerah dalam hal pembiayaan urusan pemerintahan, yang mana dalam penelitian dapat diketahui tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap bantuan transfer dari pihak luar, seperti perhitungan di bawah ini:

$$2017 = \frac{579.081.192.667,00}{711.630.009.618,17} \times 100\% = 81,37\%$$

$$2018 = \frac{583.466.860.396,00}{717.784.276.096,71} \times 100\% = 81,28\%$$

$$2019 = \frac{588.509.037.206,00}{713.313.296.387,52} \times 100\% = 82,50\%$$

$$2020 = \frac{583.446.860.396,00}{659.635.054.093,13} \times 100\% = 88,44\%$$

$$2021 = \frac{598.407.134.931,00}{692.338.666.715,00} \times 100\% = 86,43\%$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana yang terdapat pada tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria
2017	579.081.192.667,00	711.630.009.618,17	81,37	Sangat Tinggi
2018	583.466.860.396,00	717.784.276.096,71	81,28	Sangat Tinggi
2019	588.509.037.206,00	713.313.296.387,52	82,50	Sangat Tinggi
2020	583.446.860.396,00	659.635.054.093,13	88,44	Sangat Tinggi
2021	598.407.134.931,00	692.338.666.715,00	86,43	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata</b>			<b>84</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Diolah dari LRA Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2017-2021.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui selama periode tahun 2017-2021 nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat tinggi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu untuk berkontribusi besar melalui PAD. Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih sangat bergantung terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan urusan pemerintahan.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata nilai rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Tebing Tinggi termasuk ke dalam kategori kurang efektif. Hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi rata-rata sebesar 88,36%, dengan demikian disimpulkan bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi masih kurang efektif dalam merealisasikan target PAD.

Berdasarkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 2017-2021, rata-rata berada pada kisaran angka dibawah 20%. Pada tahun 2017, nilai yang didapatkan melalui perhitungan rasio kemandirian hanya sebesar 18,92%, dimana angka tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum memiliki kemandirian keuangan daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan tingkat derajat desentralisasi diketahui bahwa rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi hanya sebesar 14,46% dengan kategori kurang. Pada tahun 2017 nilai rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebesar 15,91% yang menandakan kecilnya kontribusi PAD dalam total pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi. Tidak jauh berbeda pada tahun berikutnya, pada tahun 2018 nilai rasio derajat desentralisasi yang dihasilkan hanya sebesar 15,88%, begitu pula pada tahun 2019, nilai rasio

derajat desentralisasi yang dihasilkan turun menjadi 14,75%. Penyebab menurunnya nilai tersebut dikarenakan jumlah PAD yang cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat bahwa untuk nilai rasio ketergantungan keuangan daerah selama periode 2017-2021, perolehan nilai yang didapatkan cukup besar untuk Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Rata rata nilai rasio ketergantungan yang didapatkan adalah 84% yang mana nilai rasio tersebut menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan faktor penghambat pada pengukuran kinerja keuangan daerah Kota Tebing Tinggi yaitu, sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta belum adanya regulasi yang kuat dalam hal perpajakan dan retribusi. Adapun upaya yang telah dilakukan Kota Tebing Tinggi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sistem pelayanan yang berbasis digital, menambahkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021). sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta belum adanya regulasi yang kuat dalam hal perpajakan dan retribusi. Adapun upaya yang telah dilakukan Kota Tebing Tinggi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sistem pelayanan yang berbasis digital, menambahkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi beserta jajarannya dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Tebing Tinggi yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fathiyah, Masnun. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual Tahun 2014-2015*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- . 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). *Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada LRA pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi*. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23-34.
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Ritno H. Rondonuwu. Dkk. 2015. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Vol 3 No 4*.
- Sartika, N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti*. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.
- Ula, N. N. & Bharata, R. W. (2022). *Analisis Rasio Keuangan dalam APB untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020)*. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 405-41

